

DIPLOMASI INDONESIA TERKAIT PEMBERANTASAN *DRUGS TRAFFICKING*

Wulandari Cahyasari

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: One of the crucial transnational crime in Southeast Asia nowadays is drugs trafficking. In facing this condition Indonesian government takes an action through regional diplomacy such as ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD). This forum is an international organization under the auspices of ASEAN working on countering illegal drugs trafficking. This research aims to identify and analyze the diplomatic efforts and obstacles of Indonesian government through international organizations such as ASOD related to combating drugs trafficking. This research used a qualitative approach and the primary data were collected through interviews with the informants from institutions Ministry of Foreign Affairs and the National Narcotics Agency. The results of this research explain the diplomatic efforts of Indonesia in ASOD of sharing information and negotiation. And the obstacles that hampering the implementation of Indonesia's diplomacy in ASOD caused of several aspects. In addition to the existing obstacles, ASOD as a platform of diplomacy in regional forum is not run effectively to counter narcotics problem in Indonesia due to ASOD is only a forum for sharing information.

Abstrak: Salah satu kejahatan transnasional yang sangat krusial di Asia Tenggara saat ini adalah kejahatan dibidang perdagangan narkoba. Dihadapkan pada kondisi ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan melakukan upaya diplomasi melalui forum regional seperti *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. Forum ini merupakan organisasi internasional di bawah naungan ASEAN dalam menanggulangi masalah peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya dan hambatan diplomasi Indonesia melalui ASOD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data-data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari instansi Kementerian Luar Negeri dan Badan Narkotika Nasional. Selain itu, literatur, dan dokumen terkait juga digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian ini menjelaskan upaya-upaya diplomasi Indonesia dalam ASOD melalui sharing informasi dalam forum ASOD dan berbagai negosiasi. Namun diplomasi itu sendiri belum berjalan maksimal dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam implementasi diplomasi. Dalam hal ini, ASOD sebagai wadah diplomasi di forum regional tidak berperan efektif dalam menanggulangi masalah narkoba di Indonesia karena ASOD tidak langsung terjun ke lapangan melainkan hanya sebagai forum *Sharing Information* saja.

Kata Kunci: diplomasi, perdagangan narkoba, ASOD

PENDAHULUAN

Masalah penyalahgunaan dan perdagangan illegal narkoba dan obat-obatan terlarang terus menjadi permasalahan global, terjadi hampir diseluruh negara di dunia. Pedagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak terlepas dari kenyataan bahwa Asia Tenggara merupakan salah satu penghasil obat-obatan terbesar di dunia setelah “Bulan Sabit Emas” (Afghanistan, India, Pakistan dan Colombia), melalui keberadaan “Segitiga Emas” atau *The Golden Triangle* diperbatasan daerah Thailand utara, Laos bagian barat, dan Myanmar bagian timur. Di kawasan inilah narkoba, heroin, dan amphetamine diproduksi dan disebar ke

seluruh penjuru dengan menghasilkan 60 persen produksi opium dan heroin di dunia.¹ Myanmar sebagai penghasil opium terbesar di dunia, Laos sebagai penghasil opium terbesar kedua setelah Myanmar dan Thailand mendominasi dalam penjualan ekstasi, shabu-shabu, serta pengguna narkoba terbesar di dunia.²

Indonesia yang merupakan salah satu negara Asia Tenggara dan juga negara berkembang di Asia, kini sudah menjadi salah satu negara tujuan jalur perdagangan narkoba internasional.

¹ Kerjasama ASEAN-Deplu, *Kerjasama ASEAN dalam Perdagangan Illegal Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya*. Deplu, Jakarta, 2000, hal. 11.

² Zarina Othman. *Myanmar, Illicit Drugs Trafficking and Security Implication*, Akademika 65, 2004, Hal 33.

Luas dan letak wilayah yang strategis membuat Indonesia dijadikan tempat singgah dan beredarnya narkoba dengan berbagai cara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan terungkapnya para pengedar jaringan narkoba skala internasional. Penyalahgunaan narkoba sudah mencapai tingkat mengkhawatirkan dengan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Dari laporan akhir yang telah dilakukan Badan Narkotika Nasional dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, prevalensi jumlah pengguna narkoba di tingkat nasional mencapai 2,44% dari 4.323.366 jiwa. Tahun 2013, prevalensi mengalami peningkatan sebesar 2,56% dari 4.583.690 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah pengguna narkoba kembali mengalami peningkatan menjadi 2,68% dari 4.851.486 total pengguna, dan pada periode yang sama di tahun 2015 meningkat menjadi 2,8% dari 5.126.913 jiwa.³ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah peredaran narkoba mengalami kenaikan dalam setahun. Dan jalur pemasok peredaran narkoba ke Indonesia berasal dari tiga negara yaitu Thailand, Myanmar dan Laos yang berupa opium.⁴

Menangkap dari situasi dan kondisi peningkatan peredaran narkoba seperti yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa Indonesia berada pada tingkat negara darurat narkoba. Indonesia dulunya adalah sebuah negara yang merupakan tempat penjualan, produksi, jalur transit untuk sindikat narkoba internasional, kini Indonesia telah dikenal sebagai negara produsen dan pengeksport. Ini artinya, langkah tegas perlu diambil oleh Indonesia untuk mengatasi masalah narkoba yang sudah sangat krusial bagi masyarakat Indonesia. Mengingat masalah *drugs trafficking* termasuk salah satu kejahatan transnasional yang merupakan gejala global sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional.⁵

Kebijakan Indonesia terkait narkoba inilah yang perlu dikomunikasikan oleh Indonesia melalui jalur diplomasi bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hofstede dan Matos, dalam risetnya mengenai bahasa diplomasi mengatakan bahwa esensi dari bahasa diplomasi (*diplomacy language*) ialah menggunakan bahasa dengan cara-cara kondusif, guna mengonstruksi dan mendukung terwujudnya konsensus dan kolaborasi antar bangsa.⁶ Bahasa diplomatik harus bisa bermakna *peace-building*, *peace-making* dan *peace promoting force*.⁷ Bahasa diplomasi terkait pemberantasan sindikat narkoba internasional menjadi salah satu upaya Indonesia untuk dapat mengejar kepentingan nasionalnya dengan cara saling bertukar informasi secara terus-menerus dengan negara lain. Tujuan persuasifnya adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku lawannya.

Wadah atau forum multilateral juga harus dimanfaatkan Indonesia untuk membangun komunikasi yang intensif, selain bertukar pengalaman dan informasi seputar pemberantasan narkoba, dalam forum multilateral tersebut juga akan dibahas berbagai upaya kerjasama untuk memberantas peredaran gelap narkoba dalam lingkup yang lebih luas, baik di suatu kawasan maupun tingkat global. Dalam menangani masalah narkoba, selain melakukan kerjasama luar negeri dengan berbagai negara, Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum regional maupun internasional yang membahas mengenai penanggulangan permasalahan narkoba.

ASEAN sendiri memiliki tekad dalam menangani permasalahan narkoba sejak tahun 1972 dengan diadakannya *ASEAN Expert Group Meeting in the Prevention and Control of Drug Abuse*, kemudian ditindaklanjuti pada *Bali Concord* 1 tahun 1976 yang menghasilkan beberapa komite, salah satunya adalah *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*

³ Budi Waseso. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2015*. Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2015, hal. 9.

⁴ *Ibid*

⁵ Abdurrachman Mattalitti. *Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departmen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 1.

⁶ G. Hofstede. *Diplomats as Cultural Bridge Builders*. Paper Presented at the Second International Conference on Intercultural Communication and Diplomacy, Malta, 2004, hal. 22.

⁷ W. Riawan Tjandra, *Diplomasi Antinarkoba*. Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Jakarta, 2015, Hal 2

yang fokus menangani masalah peredaran narkoba dan penanganan kejahatan lintas negara di bidang narkoba.⁸ ASOD merupakan pilar utama ASEAN dalam hal menanggulangi pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara, berdiri pada tahun 1984 yang mana sebelumnya merupakan pertemuan rutin dibawah koordinasi komite pembangunan sosial (COSD). Secara umum, mekanisme kerja ASOD adalah membuat agenda, merancang proyek kerjasama terkait penanggulangan masalah narkoba serta menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari hasil *working group* yang diwakili oleh ASOD sendiri.⁹

Agenda ASOD sendiri mencakup mandat dalam peningkatan pelaksanaan deklasifikasi prinsip-prinsip ASEAN untuk memerangi masalah narkoba dengan mengkonsolidasi dan memperkuat upaya-upaya bersama dalam pengendalian dan pencegahan masalah narkoba di kawasan ASEAN dan merancang, melaksanakan, monitor, serta mengevaluasi semua program ASEAN terkait tindakan dalam hal kontrol serta pencegahan perluasan sindikat narkoba internasional. Dari uraian diatas, diplomasi Indonesia melalui *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) diharapkan dapat membantu mengurangi atau bahkan memberantas *drugs trafficking* dengan membangun kerjasama eksternal, memfasilitasi, mewedahi, memberikan rekomendasi terkait pemberantasan sindikat narkoba berdimensi internasional.

METODE

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini mengarah pada metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berguna untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya dan biasanya mengejar data verbal yang lebih mewakili fenomena dan bukan angka-angka berupa

statistik yang kurang mewakili seluruh fenomena.¹⁰ Penelitian jenis ini tidak menggunakan sistem matematika dan statistik dalam penggunaannya. Oleh karena itu data yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat penulis sendiri.

Menurut peneliti, metode kualitatif sangat cocok digunakan untuk meneliti permasalahan yang sedang dibahas ini. Hal itu karena upaya suatu negara dalam melakukan diplomasi merupakan sesuatu yang tidak dapat dikuantitatifkan. Namun diplomasi tersebut dapat dilihat dengan menelaah berbagai macam sumber yang memiliki validitas yang memadai. Metode dilaksanakan dengan pengoperasian konsep-konsep dan teori sehingga dapat mendekati kebenaran. Metode penelitian kualitatif yang digunakan diharapkan dapat membantu penelitian dalam menjawab dan menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan bagaimana adanya.¹¹ Penelitian deskriptif meneliti satu set kondisi dan obyek yang dalam konteks penelitian ini adalah diplomasi Indonesia. Fakta yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah diplomasi Indonesia melalui forum regional ASOD dalam pemberantasan sindikat narkoba. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari aktor berpengaruh, pada penulisan ini penulis akan melakukan wawancara untuk mendukung data-data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu bukti bahwa Indonesia menjadi target sindikat narkoba internasional adalah banyaknya warga negara asing (WNA) yang ditangkap dan diproses secara hukum di Indonesia

⁸ Syafri Harto dan Arif Sbastian, *Peranan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam menanggulangi Drugs Trafficking di Thailand 2005-2010*, Jurnal Transnasional Vol.5 No.1, 2013, hal 3

⁹ ASEAN Selayang Pandang, Edisi 2008. Diektorat Jenderal ASEAN Departmen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2008, hal 79.

¹⁰ Yuli Fachri, Thesis: *Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia dalam Menetapkan Batas Laut Teritorial*, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau, 2012, hal. 36

¹¹ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2011, Hal. 21.

karena berusaha menyelundupkan narkoba. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara (separuh dari penduduk ASEAN yang berjumlah lebih dari 500 juta jiwa), ditambah dengan pengguna narkoba yang cenderung meningkat jumlahnya, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba internasional.

Ini artinya, langkah tegas memang perlu diambil oleh Indonesia untuk mengatasi masalah narkoba melalui diplomasi multilateral dengan berbagai negara untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati negara-negara lain dalam relasi internasional. Diplomasi yang dilakukan Indonesia sudah tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya kebijakan Indonesia yang tegas dalam memerangi peredaran gelap narkoba. Hasil dari kebijakan ini lah yang nantinya akan di masukkan dalam daftar diplomasi Indonesia melalui forum-forum regional yang khusus menangani masalah peredaran gelap narkoba seperti *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*.

Keikutsertaan Indonesia dalam *Asean Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* menggambarkan keinginan Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasionalnya melalui lingkup internasional. Tindakan ini juga merupakan salah satu pemahaman bahwa lingkungan eksternal memiliki pengaruh pada kondisi nasional Indonesia. Jika merujuk pada Jackson & Sorensen yang menjelaskan bahwa kepentingan nasional terbentuk dari asumsi bersama suatu bangsa terhadap kondisi tertentu yang mengharuskan suatu negara menjadikan perhatian mendasar.¹² Maka keikutsertaan Indonesia dalam ASOD menggambarkan bahwa bangsa Indonesia memandang ancaman sindikat narkoba internasional sebagai situasi yang dapat mengancam kondisi keamanan nasional dan diperlukan suatu perhatian mendasar dalam mencegah ancaman tersebut.

Berdasarkan pandangan bahwa beredarnya narkoba dan maraknya jaringan sindikat narkoba merupakan ancaman yang dapat me-

ngganggu pertahanan dan keamanan suatu negara serta dapat menimbulkan dampak ekonomi, politik, dan sosial, maka setiap negara wajib menindaklanjuti ancaman ini melalui lingkup internasional maupun regional. Karena diketahui, bahwa ancaman yang sifatnya lintas negara, tidak akan ada negara yang bisa mengatasinya sendiri. Dengan demikian, bergabungnya Indonesia dalam ASOD memiliki tujuan umum yaitu untuk mengoptimalkan fungsi pertahanan negara dalam menjaga dan melindungi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas keselamatan bangsa dari segala ancaman.

Peredaran narkoba dan peran sindikat narkoba yang berskala internasional selalu dihadapkan dengan ancaman yang bersifat lintas batas, tidak terduga, dan sulit dideteksi. Oleh sebab itu perlindungan negara terhadap ancaman tersebut tidak bisa hanya dibangun dari domestik saja melainkan dari luar juga. Pada kondisi ini, pemerintah Indonesia perlu membangun diplomasinya dalam mencari informasi dan membangun hubungan dengan negara lain sehingga mampu mencegah ancaman sebelum masuk ke Indonesia.¹³ Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba dengan turut berperak aktif dalam melakukan upaya diplomasi melalui sejumlah pertemuan internasional, baik dalam konteks regional, multilateral, bilateral maupun pada berbagai forum lainnya.

Di tingkat regional, Indonesia melakukan upaya pemberantasan drugs trafficking melalui upaya diplomasi dalam forum *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)* dengan menjalin kerjasama dan kesepakatan-kesepakatan bersama negara-negara anggota melalui *sharing information* dan *negoisasi*. Melalui *sharing information* Indonesia melakukan beberapa pertemuan dengan negara-negara anggota ASOD di setiap pertemuan rutin *ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*. dalam rentan waktu 2013-2016, antara lain: 1) *34th ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*, in Yangon, Myanmar 2013. 2) *35th ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD)*, in Makati

¹² Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relation*. United Kingdom, Oxford University Press, 2013, hal 6

¹³ Paulina Gupta Wijaya (Pejabat Fungsional, Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, wawancara pribadi, 16 Februari 2017

City, Filipina 2014. 3) 36th ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), in Singapore 2015. 4) 37th ASEAN Senior Officials on Drug Matters (ASOD), in Bangkok, Thailand, 2016.

Setelah melakukan *sharing* informasi melalui pertemuan rutin ASOD, pada tahap selanjutnya masing-masing negara anggota melakukan negosiasi untuk membicarakan jalur yang akan ditempuh masing-masing negara dalam untuk membuat kesepakatan bersama. Melalui negosiasi, pemerintah Indonesia mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk dikomunikasikan dan dinegoisasikan bersama negara-negara anggota sebagai implementasi diplomasi dalam forum ASOD.

Dalam hal ini beberapa negosiasi yang dilakuka Indonesia dalam pertemuan ASOD yaitu, 1) Negosiasi Indonesia terkait pelaksanaan hukum, dimana Indonesia sebagai tuan rumah pada pertemuan ASOD ke 21 menyampaikan upaya dalam memberantas narkoba dengan diadakan pelaksanaan pidana mati baik sindikat narkoba baik skala nasional maupun internasional. 2) Negosiasi pencegahan melalui pendidikan narkoba, dengan menyampaikan upayanya terkait pencegahan dalam forum ASOD melalui program kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang disusun oleh Badan Narkotika Nasional yang bertujuan peningkatan pengungkapan jaringan gelap narkoba melalui pendidikan narkoba. 3) Negosiasi pengobatan dan rehabilitasi, Indonesia mengupayakan program ini dengan melakukan *sharing* informasi kepada negara Malaysia dan negara-negara anggota lainnya yang nantinya disampaikan dalam pertemuan-pertemuan ASOD berikutnya.

Terlepas dari upaya-upaya diplomasi Indonesia dalam kerangka ASOD terkait pemberantasan sindikat narkoba internasional, Indonesia juga memiliki kendala atau hambatan-hambatan yang membuat jalannya diplomasi kurang begitu efektif. Adapun hambatan-hambatan tersebut yaitu: *pertama*, kurangnya Komitmen dari Negara-negara Anggota ASOD (*Uncomittment from members of ASOD*), Meskipun pertemuan terus dilakukan diberbagai forum *drugs expert* seperti *ASEAN Senior Officials on*

Drug Matters (ASOD) dengan isu pemberantasan narkoba internasional menjadi agenda prioritas, namun dalam perkembangannya masih terdapat beberapa negara yang cenderung belum sepenuhnya komitmen terhadap penyelesaian serta penanggulangan isu ini.

Kedua, Permasalahan Dana (*Fund*), permasalahan yang menjadi penghambat dalam kelancaran proyek-proyek maupun program-program ASOD terkait dalam penanggulangan *drugs trafficking* adalah kurangnya dana. Meskipun ASEAN telah memiliki *ASEAN Foundation* dan *Skema Cost Sharing* sebagai alternatif pendanaan, akan tetapi banyaknya program dan proyek ASOD terkait berbagai macam pembenahan membuat dana yang didapat untuk program penanggulangan *drugs trafficking* masih terbilang minim.¹⁴ Oleh karena itu, ASOD masih sangat mengandalkan bantuan dana dari Mitra Wicara ASEAN.

Ketiga, Faktor Geografis ASEAN (*ASEAN Geographical Factors*), pada dasarnya, letak geografis kawasan Asia Tenggara yang strategis dan mudah mencapai kawasan lain melalui jalur laut seperti ke Timur Tengah, Jepang, dan Australia. Kondisi geografis ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah transit yang strategis terkait peredaran ilegal narkoba dan maraknya jaringan sindikat narkoba internasional. Tidak hanya itu, adanya kawasan sub regional seperti halnya Greater Mekong Sub-region telah menjadi rute maupun tujuan perdagangan obat-obatan ilegal itu sendiri dan jalur ini memberi jalan bagi *drug traffickers* untuk memasarkannya ke pasar internasional.¹⁵

Keempat, Aspek Hukum (*Law Aspect*), masalah lain yang timbul terkait aspek hukum adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi anggota ASOD yang melanggar atau tidak mematuhi komitmen yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan bagi negara anggota yang menganggap jaringan sindikat narkoba yang ada di kawasan

¹⁴ *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Transnational, Khususnya Penyalahgunaan Narkoba dan Obat Berbahaya*. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri R.I, Jakarta, 2000, hal 182

¹⁵ Yasmin Sungkar. *Isu-isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*. Jakarta: LIPI Press, 2008, hal 83

ASEAN tidak sebagai ancaman bersama tidak dapat diberikan sanksi yang tegas dan dihukum. Selain hal diatas yang menjadi hambatan Indonesia di dalam aspek hukum adalah perbedaan pendapat antar negara anggota dalam menetapkan hukum yang tegas bagi para sindikat narkoba internasional.

SIMPULAN

Melalui *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) yang merupakan forum di bawah naungan ASEAN dalam hal penanggulangan masalah peredaran gelap narkoba dan obat-obatan terlarang, pemerintah Indonesia mengimplementasikan diplomasi yang bersifat multilateral dengan membentuk dan meningkatkan rasa saling percaya diantara negara-negara ASOD untuk melindungi keamanan nasionalnya dengan mengurangi potensi ancaman dan membentuk jalinan kerjasama regional. Secara umum, peran ASOD berisikan tiga variabel utama yaitu, kebijakan, pendekatan, dan strategi. Adapun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui forum ASOD adalah melalui *sharing* informasi disetiap pertemuan-pertemuan ASOD guna membahas beberapa negoisasi didalamnya yang meliputi, Pelaksanaan Hukum (*Law Enforcement*), Pencegahan melalui Pendidikan Narkoba (*Preventive Drug Education*), Pengobatan dan Rehabilitasi (*Treatment and Rehabilitation*), serta Deteksi Obat (*Detection of Drug*). Selain itu Indonesia juga berupaya meningkatkan kapasitas melalui berbagai pelatihan yang bertujuan untuk membangun pengetahuan dan informasi dibidang narkoba.

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi diplomasi Indonesia dalam ASOD meliputi, Aspek Hukum, Kurangnya Komitmen dari Negara-negara Anggota ASOD, Permasalahan Dana (*Fund*), dan Faktor Geografis ASEAN. Terkait upaya ASOD yang tidak berperan untuk terjun langsung ke lapangan dalam bentuk aksi di Indonesia. Hal ini jugalah yang menjadikan diplomasi Indonesia lemah dalam kerangka ASOD karena setiap upaya diplomasi yang diutarakan Indonesia jadi hanya bersifat *sharing information* saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Broome, John. *Transnational Crime in The Twenty-First Century*. Canberra, 2000.
- Fachri, Yuli. Thesis: *Politik Luar Negeri Malaysia terhadap Indonesia dalam Menetapkan Batas Laut Teritorial*, Program Pascasarjana Ilmu Politik, Universitas Riau, 2012.
- Hofstede, G. *Diplomats as Cultural Bridge Builders*. Paper Presented at the Second International Conference on Intercultural Communication and Diplomacy, Malta, 2004.
- Kerjasama ASEAN-Deplu, *Kerjasama ASEAN dalam Perdagangan Illegal Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya*. Deplu, Jakarta, 2000.
- Mattalitti, Abdurrachman. *Kerjasama ASEAN dalam menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departmen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2001.
- Mueller, Gerhard O. W. *Transnational Crime, Definitions and Concepts*. Combating Transnational Crime, a special Issue of Transnational Organized Crime, Autumn/Winter 1998.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2011.
- Othman, Zarina. *Myanmar, Illicit Drugs Trafficking and Security Implication*, Akademika 65, 2004.
- Sebastian, Arif & Syafri Harto. *Peranan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters (ASOD) dalam menanggulangi Drugs Trafficking di Thailand 2005-2010*, Jurnal Transnasional, 2013, Vol.5 No.1.
- Sungkar, Yasmin. *Isu-isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*. Jakarta: LIPI Press, 2008.
- Tjandra, W. Riawan. *Diplomasi Antinarkoba*. Kementerian Hukum dan HAM RI, Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Jakarta, 2015.
- Waseso, Budi. *Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2015*. Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2015.